

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR**

**TRIWULAN 2
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**LAPORAN TRIWULAN 2
HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
TAHUN 2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Disahkan di Makassar
Pada hari Jumat, 29 Juli 2022

KETUA TIM SURVEI



MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H.
NIP. 19631025 199212 1 001

Mengetahui :

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



DR. H. SYAHRIL SIDIK, S.H., M.H.
NIP. 19570503 198403 1 002

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Makassar mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Makassar yang diambil dengan kuesioner secara daring dan dapat diakses di mana saja menggunakan aplikasi SISUPER yang disediakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Makassar dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

Makassar, 29 Juli 2022

Ketua Tim Survei,



MUHAMMAD DAMIS, S.H., M.H.
NIP. 19631025 199212 1 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	7
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	8
BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator	15
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar	23
BAB IV PENUTUP	28
4.1. Kesimpulan.....	28
4.2. Rekomendasi	30
4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan	31
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	8
2. Nilai Persepsi	9
3. Responden Berdasarkan Umur / Usia	10
4. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	11
5. Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir	12
6. Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama	13
7. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan	15
8. Indeks Pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	16
9. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh.....	16
10. Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya.....	17
11. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan.....	18
12. Indeks Pada Indikator Hadiah	19
13. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya	20
14. Indeks Pada Indikator Percaloan	20
15. Indeks Pada indikator Perbuatan Curang.....	21
16. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia.....	22
17. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	23
18. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT Makassar	25
19. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada Survei Triwulan 3/2021 ...	28
20. Rencana Tidak Lanjut Perbaikan	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Makassar merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Makassar untuk menjadi satuan kerja menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner melalui aplikasi SISUPER
 - b. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden melalui link aplikasi SISUPER.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei Persepsi Anti Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *Morgan and Krejcie*, yaitu jumlah sampel responden ditentukan dari jumlah populasi survei harian selama 3 bulan terakhir. Lalu sampel responden diarahkan untuk mengakses kuesioner digital melalui website Pengadilan Tinggi Makassar yang terkoneksi ke aplikasi SISUPER Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Link aplikasi SISUPER diberikan kepada daftar pelanggan (pengguna) tetap layanan Pengadilan, dan juga kepada pencari keadilan yang menggunakan layanan pengadilan dalam waktu tertentu. Berikut *Customer Base* (daftar layanan) Pengadilan Tinggi Makassar :

No.	Jenis Layanan
A	KEPANITERAAN
	1. Pengaduan
	2. Pemberian Informasi
	3. Permohonan Banding
	4. Pembinaan dan Pengawasan
	5. Ijin Penelitian
	6. Advokat/Permohonan Sumpah
7. Perpanjangan Penahanan	
B	KESEKRETARIATAN
	1. Pengaduan
	2. Permohonan Informasi
	3. Pembinaan dan Pengawasan

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Makassar.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Makassar.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara daring. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan. Selanjutnya data diunggah oleh petugas pelaksana dari aplikasi SISUPER.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar). Wakil Ketua Pengadilan

Tinggi Makassar akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data Persepsi Anti Korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka Persepsi Anti Korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :



Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas

Tabel 1. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

3.1.1. Umur / Usia

Responden menurut karakteristik umur/usia, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3
Responden Berdasarkan Umur/ Usia

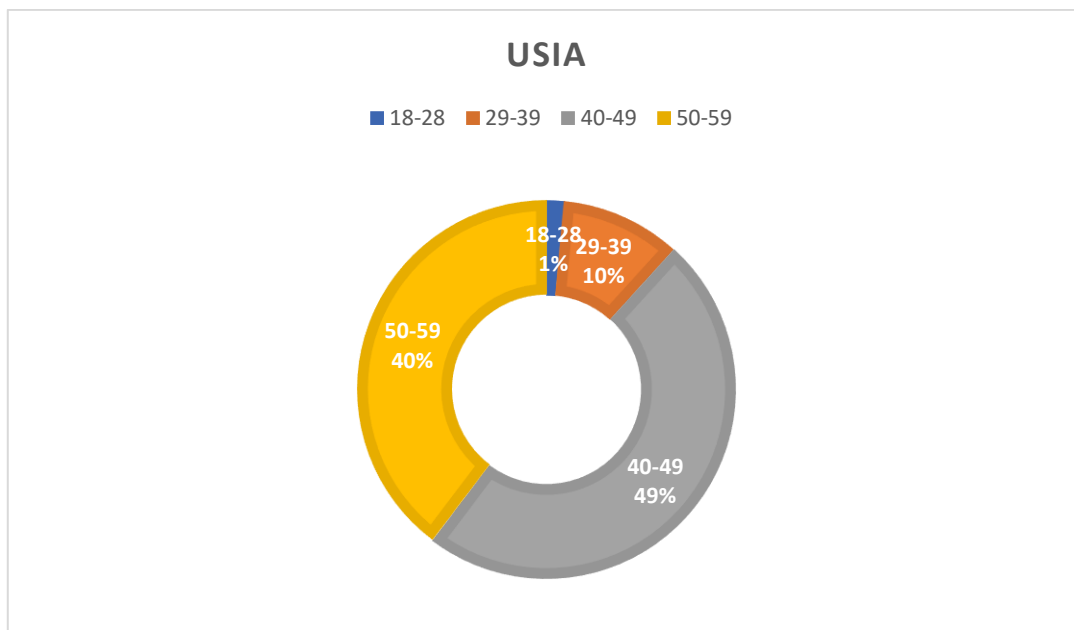
No	Umur / Usia	Frekuensi	%
1	18-28	1	1.47
2	29-39	7	10.29
3	40-49	33	48.53
4	50-59	27	39.71
5	60-69	0	0
Jumlah		68	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 68 responden, mayoritas responden pada survei ini yakni responden dengan rentan usia 40-49 tahun sebanyak 33 orang (48.53%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan rentan usia 18-28 sebanyak 1 orang (1.47%).

Karakteristik Rentan usia/umur dari 68 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2
Responden Berdasarkan Umur / Usia



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.2. Jenis Kelamin

Responden menurut karakteristik jenis kelamin, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 4
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

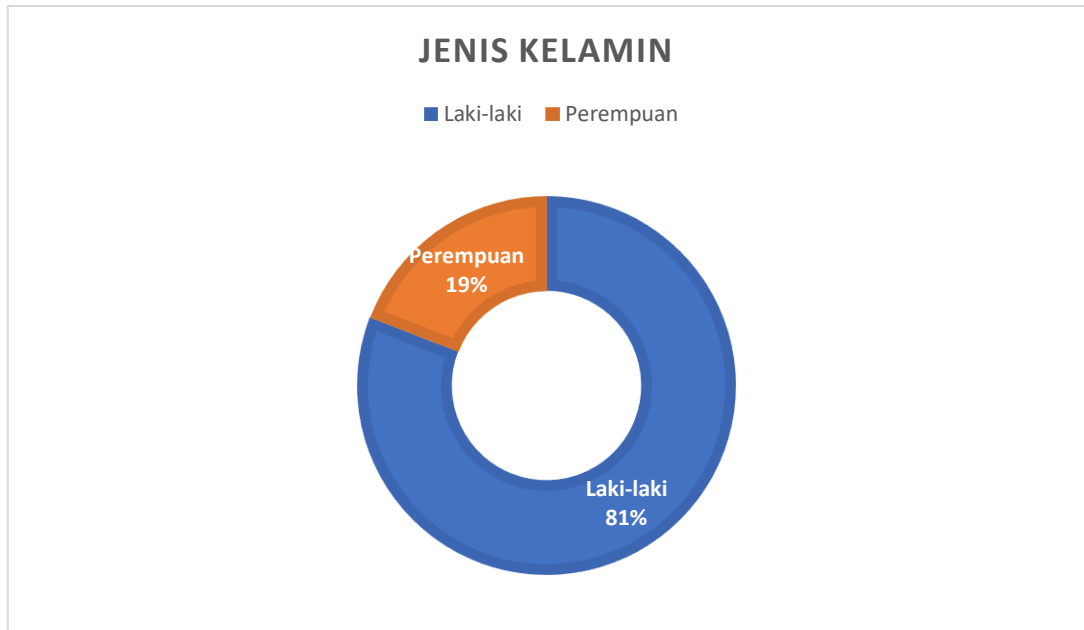
No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki - laki	55	80.88
2	Perempuan	13	19.12
Jumlah		68	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Kelamin di atas bahwa dari total 68 responden, mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 55 orang (80.88%) dan perempuan sebanyak 13 orang (19.12%).

Karakteristik Jenis kelamin dari 68 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 3
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.3. Pendidikan Terakhir

Responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	0	0
4	SMA	0	0
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	0	0
8	S1 / D4	37	54.41
9	S2	29	42.65
10	S3	2	2.94

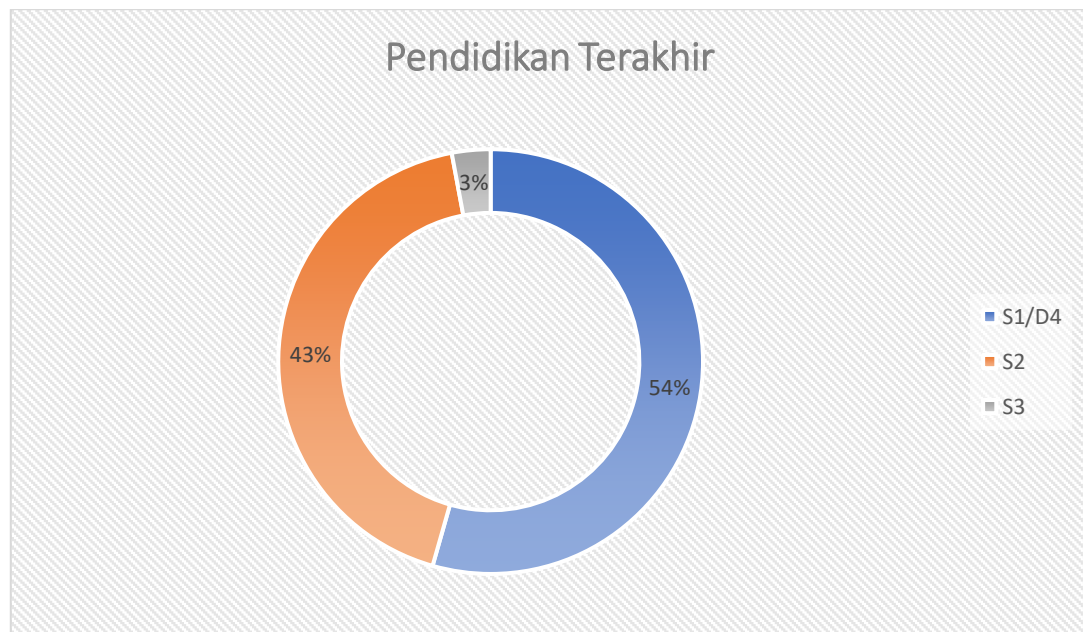
Jumlah	68	100
--------	----	-----

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan Terakhir di atas dapat diketahui bahwa mayoritas dari keseluruhan responden pada survei ini, adalah responden dengan pendidikan terakhir Sarjana (S1/D4) sebanyak 37 orang (54.41%) dan yang paling sedikit yakni responden dengan Pendidikan Terakhir S3 sebanyak 2 orang (2.94%).

Karakteristik Pendidikan Terakhir dari 68 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.1.4. **Pekerjaan Utama**

Responden menurut karakteristik latar belakang pekerjaan, ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 6
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

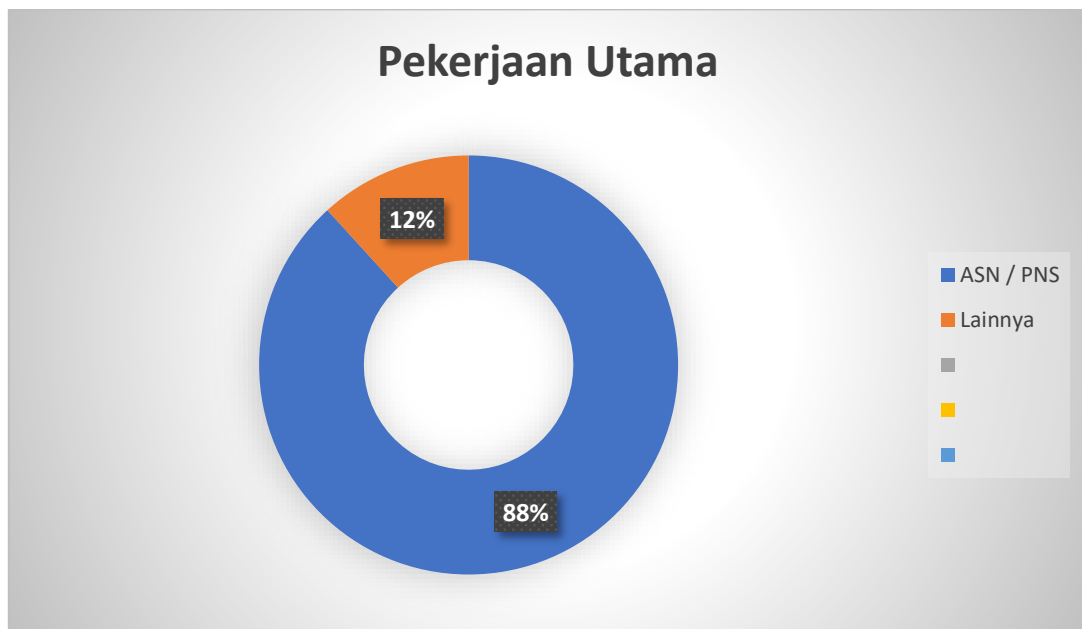
No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	ASN / PNS	60	88.23
2	TNI	0	0
3	POLRI	0	0
4	Swasta	0	0
5	Wirausaha	0	0
6	Tenaga Kontrak	0	0
7	Masyarakat Lainnya selaku Pencari Keadilan	8	11.77
Jumlah		68	100

Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama di atas bahwa dari total 68 responden, mayoritas responden pada survei ini berprofesi ASN/PNS yakni sebanyak 60 orang (88.23%), dan yang paling sedikit yakni responden dengan kategori Masyarakat Lainnya sebanyak 8 orang (11.77%).

Karakteristik Pekerjaan Utama dari 68 responden pada survei ini, secara ringkasnya disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama



Sumber : hasil pengolahan data kuesioner

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval index 3,970.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			F	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,970
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	2,94%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	66	264	97,06%	
Jumlah			68	270	100%	

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	68	272	100%	
Jumlah			68	272	100%	

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Menjual Pengaruh.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	

1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	68	272	100%	
Jumlah			68	272	100%	

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,985.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari Transaksi Biaya di luar dari yang telah ditetapkan secara resmi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator transaksi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,985
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	1,47%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	67	268	98,53%
Jumlah			68	271	100%

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,897.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari korupsi melalui Biaya Tambahan.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	2	2	2,94%	3,897
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	1,47%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	65	260	95,59%	
Jumlah			68	265	100%	

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 3,911.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari pemberian/menjanjikan hadiah.

Tabel 12.

Indeks pada indikator hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	2	2	2,94%	3,911
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	66	264	97,06%	
Jumlah			68	266	100%	

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,985.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari ketidaktransparansi biaya.

Tabel 13.

Indeks pada indikator transparansi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,985
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	1,47%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	67	268	98,53%	
Jumlah			68	271	100%	

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari praktik percaloan.

Tabel 14.

Indeks pada indikator percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	

1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	68	272	100%	
Jumlah			68	272	100%	

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,985.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 15.

Indeks pada indikator perbuatan curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	3,985
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	1,47%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	67	268	98,53%
Jumlah			68	271	100%

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar bebas dari transaksi rahasia.

Tabel 16.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0%	4
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	0	0	0%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	68	272	100%	
Jumlah			68	272	100%	

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Makassar

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar sebesar **3,97** atau **99,34**.

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi dimaksud seperti tertuang pada table berikut :

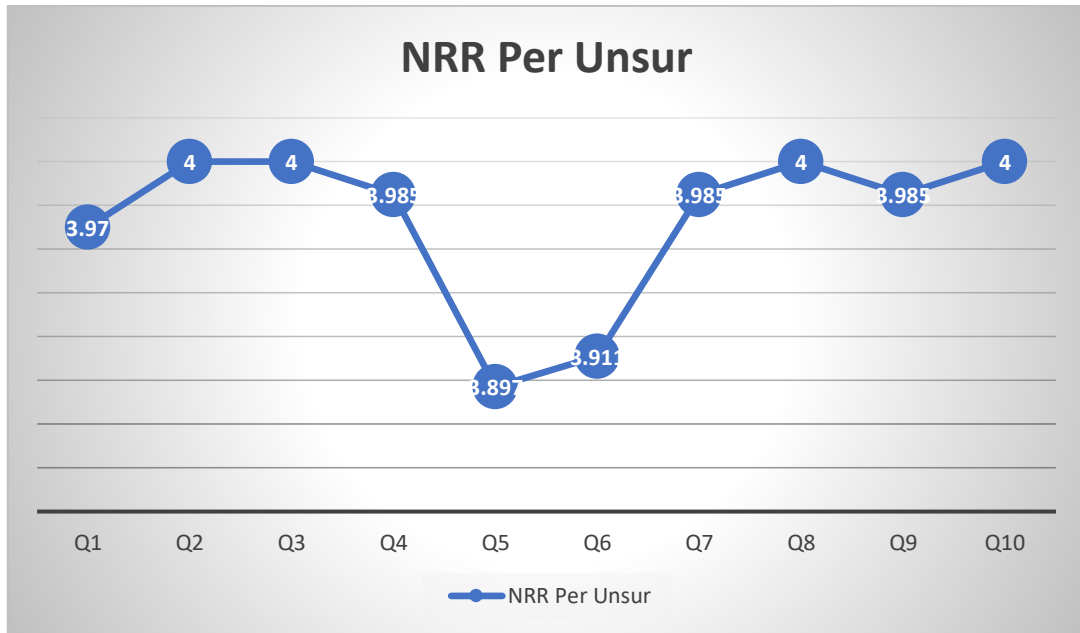
Tabel 17.
Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Tinggi Makassar

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,970
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4
Q 3	Menjual Pengaruh	4
Q 4	Transaksi Biaya	3,985
Q 5	Biaya Tambahan	3,897
Q 6	Hadiah	3,911
Q 7	Tranparansi Biaya	3,985
Q 8	Percaloan	4
Q 9	Perbuatan Curang	3,985
Q 10	Transaksi Rahasia	4
JUMLAH		39,735
NILAI RATA-RATA IPK		3,97

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan
NRR : **Nilai Rata-rata**
 IPK : Indeks Persepsi Anti Korupsi
 : **Jumlah NRR IPK**
 *) **Tertimbang**
 NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
 Jumlah kuesioner yang terisi

IPK : 3.97



Gambar 6
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Makassar

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 18.
Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Tinggi Makassar

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Kesan & Pesan Responden

	Kesan & Pesan
1	Semoga dipertahankan kualitas pelayanannya
2	Semoga dapat dipertahankan dan sedapat mungkin ditingkatkan
3	-
4	Ok
5	Tetap dipertahankan
6	PT MAKASSAR MANTAP
7	Dipertahankan
8	Tetap dipertahankan
9	Pelayanan sudah baik dan terus dipertahankan bila perlu ditingkatkan
10	Semoga semakin sukses
11	Tetap mempertahankan pelayanan yang baik
12	Dipertahankan
13	Semoga pelayanan PTSP semakin baik
14	Pelayanan sudah baik
15	Tingkatkan perilaku anti korupsi..
16	Pelayanan sangat baik
17	tingkatkan pelayanan
18	Sangat membantu dan memudahkan

19	Sangat membantu dan memudahkan
20	Tetap Semangat Dalam Melayani
21	Pelayanan yang diberikan sudah sangat baik, harap dipertahankan dan ditingkatkan dengan tetap menerapkan 3S dan 5R.
22	Semoga tetap semangat
23	Sangat Baik
24	PT MAKASSAR SUKSES SELALU
25	Kami telah pelayanan
26	-
27	Pelayanan yang diberikan sudah baik dan memuaskan
28	Peningkatan layanan berbasis TI perlu ditingkatkan
29	Pelayanan di Pengadilan Negeri Watampone semakin hari semakin baik
30	Pelayanan di Pengadilan Negeri Watampone semakin hari semakin baik
31	Tidak ada kesan dan pesan
32	Tidak ada KKN
33	Tidak terdapat KKN
34	Sangat Baik dan di pertahankan
35	Banyaknya perubahan dan inovasi yang dilakukan oleh PT Makassar, menjadikan PT Makassar semakin baik dan layak mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
36	Pelayanan yg sudah baik agar di pertahankan
37	Mantap
38	Terimakasih atas layanannya dan mohon tetap dipertahankan
39	Pelayanannya baik.
40	Semoga selalu konsisten dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan
41	Layanan sangat baik
42	Untuk kedepannya lebih baik
43	Tetap dipertahankan
44	Semoga pelayanan di Pengadilan Tinggi Makassar baik dan dipertahankan.
45	Semoga selalu memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel bagi masyarakat pencari keadilan
46	Sukses selalu PT Makassar.
47	Semoga selalu konsisten dalam memberikan pelayanan prima terhadap pencari keadilan
48	Trima kasih atas pelayanan yang diberikan oleh petugas pelayanan, terus dipertahankan
49	Dipertahankan
50	Pelayanannya supaya dipertahankan
51	Terus meningkatkan kualitas pelayanan
52
53	Pelayanan sangat baik, sarana dan prasarana sangat nyaman
54	ok
55	Semoga pelayanan di Pengadilan semakin baik dari tahun ke tahun
56	Terus pertahankan
57	Agar pelayanan yg sudah diberikan lebih ditingkatkan dan dipertahankan
58	Sangat baik

59	semoga tetap memberikan pelayanan terbaik utk masyarakat
60	Pengadilan Tinggi Makassar menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, hebat dan pasti bisa
61	Pelayanan PT Makassar sudah sangat baik.
62	Pelayanan baik
63	Sangat memuaskan pelayanannya.....pertahankan sj
64	Semoga pelayanan di Pengadilan semakin baik dari tahun ke tahun
65	Agar diseragamkan pakaian petugasnya
66	Mohon dipertahankan
67	Pelayanan administrasi yang diberikan kepada kami sangat excellent tanpa biaya . Harapan kami PT Makassar mempertahankan standard pelayanan yang bebas dari praktek KKN sebagaimana yg telah diterapkan selama ini
68	Sudah cukup baik

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Makassar memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,97** atau **99,34%** masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

Tabel 19
Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) pada survei Triwulan 2 tahun 2022

No	Unsur Penilaian	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang	Peringkat	Nilai IPK	Kategori
1	Manipulasi Peraturan	3,970	0.397	8		A (Bersih dari Korupsi)
2	Penyalahgunaan Jabatan	4	0.400	1		
3	Menjual Pengaruh	4	0.400	2		
4	Transaksi Biaya	3,985	0.399	5		
5	Biaya Tambahan	3,897	0.390	10		
6	Hadiah	3,911	0.391	9		
7	Transparansi Biaya	3,985	0.399	6		
8	Percaloan	4	0.400	3		
9	Perbuatan Curang	3,985	0.399	7		
10	Transaksi Rahasia	4	0.400	4		
Jumlah		39,735	3.974		99,34	

Dari tabel 19 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor terendah, yaitu :

1. Biaya Tambahan (peringkat ke 10)
2. Hadiah (peringkat ke 9)
3. Manipulasi Peraturan (peringkat ke 8)

Dari tabel 19 juga dapat diketahui 3 unsur penilaian yang mendapat skor tertinggi, yaitu :

1. Penyalahgunaan Jabatan (peringkat ke 1)
2. Menjual Pengaruh (peringkat ke 2)
3. Percaloan (peringkat ke 3)

Untuk selengkapnya tabulasi perhitungan survei terdapat dalam lampiran 2.



4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Makassar Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator *Biaya Tambahan* memiliki indeks paling rendah di antara indikator lainnya yaitu 3,897 dan tergolong dalam indikator kinerja bersih dari korupsi.

4.3. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator Hasil Analisa ini perlu dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan kami prioritaskan dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya dengan jangka pendek kurang dari 3 bulan.

Rencana tindak lanjut perbaikan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 20
Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu	Penanggung-jawab
1.	Biaya Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap memutar Audio Public Campaign di lingkungan Pengadilan Tinggi Makassar. 	Setiap hari kerja, diputar setiap 2 jam.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.
2.	Hadiah	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupdate informasi pada seluruh media informasi yang dimiliki PT Makassar. 	Mei 2022.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.
3.	Manipulasi Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengupdate informasi pada seluruh media informasi yang dimiliki PT Makassar. 	Mei 2022.	Hakim Tinggi Pengawas PTSP.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Kuesioner.
2. Data Responden.

Lampiran 1 : Kuesioner

Dapat diakses pada website Pengadilan Tinggi Makassar
esurvey.pt-makassar.go.id

Lampiran 2 : Data Responden

PENGELOLAHAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN

UNIT PELAYANAN : UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN TINGGI
MAKASSAR

Data Responden Yang Diunduh dari Aplikasi SISUPER
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI :

	Domisili	Umur / Jenis Kelamin	Pendidikan / Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	SULAWESI SELATAN	197 Tahun Perempuan	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	SULAWESI SELATAN	46 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	SULAWESI TENGAH	48 Tahun Perempuan	S1PNS	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4
8	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	SULAWESI SELATAN	36 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	SULAWESI SELATAN	30 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

14	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	SULAWESI BARAT	45 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	SULAWESI SELATAN	50 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	SULAWESI SELATAN	54 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	SULAWESI SELATAN	59 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	SULAWESI SELATAN	51 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
23	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	SULAWESI SELATAN	37 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	SULAWESI SELATAN	59 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	SULAWESI SELATAN	38 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	SULAWESI SELATAN	53 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4
29	SULAWESI SELATAN	53 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	SULAWESI SELATAN	53 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	SULAWESI SELATAN	58 Tahun Laki-laki	S1PNS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
33	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
34	SULAWESI SELATAN	57 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
35	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
37	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

38	SULAWESI SELATAN	40 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
39	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	SULAWESI SELATAN	54 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
41	SULAWESI SELATAN	44 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
42	SULAWESI SELATAN	56 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4
43	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
44	SULAWESI SELATAN	57 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	SULAWESI SELATAN	48 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
46	SULAWESI SELATAN	35 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
47	SULAWESI SELATAN	55 Tahun Laki-laki	S3PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
48	SULAWESI SELATAN	38 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
49	SULAWESI BARAT	57 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
50	SULAWESI BARAT	57 Tahun Perempuan	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
51	SULAWESI BARAT	42 Tahun Laki-laki	S1LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
52	SULAWESI SELATAN	50 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
53	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
54	SULAWESI BARAT	44 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Perempuan	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	SULAWESI BARAT	55 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	SULAWESI SELATAN	52 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
59	SULAWESI BARAT	43 Tahun Laki-laki	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
60	SULAWESI SELATAN	45 Tahun Laki-laki	S1PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
61	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

62	SULAWESI SELATAN	47 Tahun Perempuan	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	1	4	4	4	4
63	SULAWESI SELATAN	38 Tahun Perempuan	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
65	SULAWESI SELATAN	42 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
66	SULAWESI BARAT	56 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
67	SULAWESI SELATAN	43 Tahun Perempuan	S2LAINNYA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
68	SULAWESI SELATAN	41 Tahun Laki-laki	S2PNS	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4